



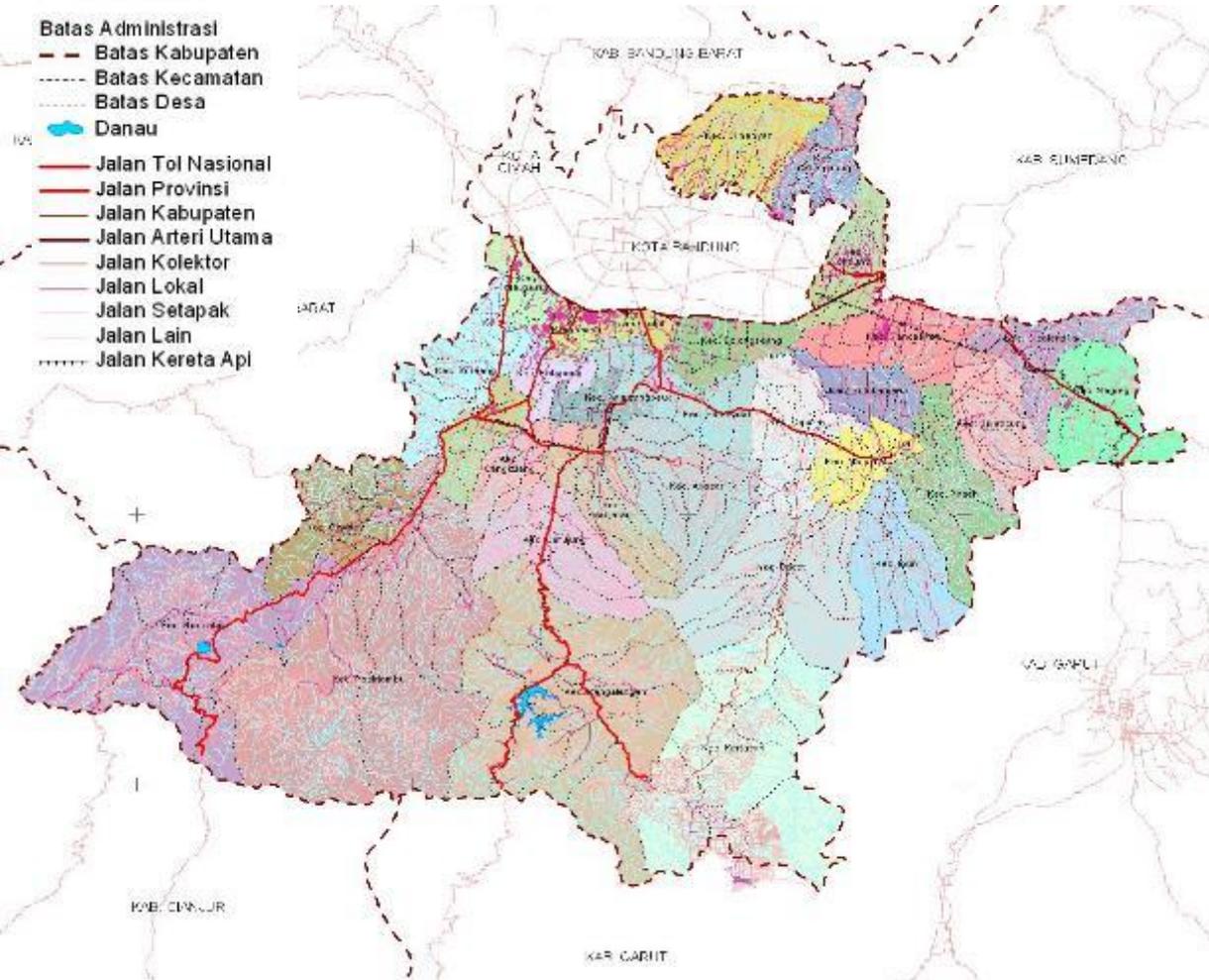
# **SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN DI KABUPATEN BANDUNG**



# Gambaran Umum Kabupaten Bandung

## KETERANGAN :

- Batas Administrasi
- - - - - Batas Kabupaten
- ..... Batas Kecamatan
- ..... Batas Desa
- ..... Danau
- Jalan Tol Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Arteri Utama
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Setapak
- Jalan Lain
- ..... Jalan Kereta Api



<b>Luas Wilayah</b>	<b>:</b>	<b>176.238,67 Ha</b>
<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>:</b>	<b>3.7 Jiwa</b>
<b>Jumlah Penduduk Laki-Laki</b>	<b>:</b>	<b>35,80 %</b>
<b>Jumlah Penduduk Perempuan</b>	<b>:</b>	<b>34,36 %</b>
<b>Jumlah Anak</b>	<b>:</b>	<b>29,84%</b>
<b>Kepadatan Penduduk</b>	<b>:</b>	<b>1.969 org/KM<sup>2</sup></b>
<b>Laju Pertumbuhan Penduduk</b>	<b>:</b>	<b>1,86 %</b>
<b>IPM</b>	<b>:</b>	<b>71.02</b>

**TERDIRI DARI 31 KECAMATAN, 270 DESA DAN 10 KELURAHAN**

# VISI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021



- *“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”*

# MISI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 -2021

- 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia**
2. Menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu dengan tata ruang wilayah
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

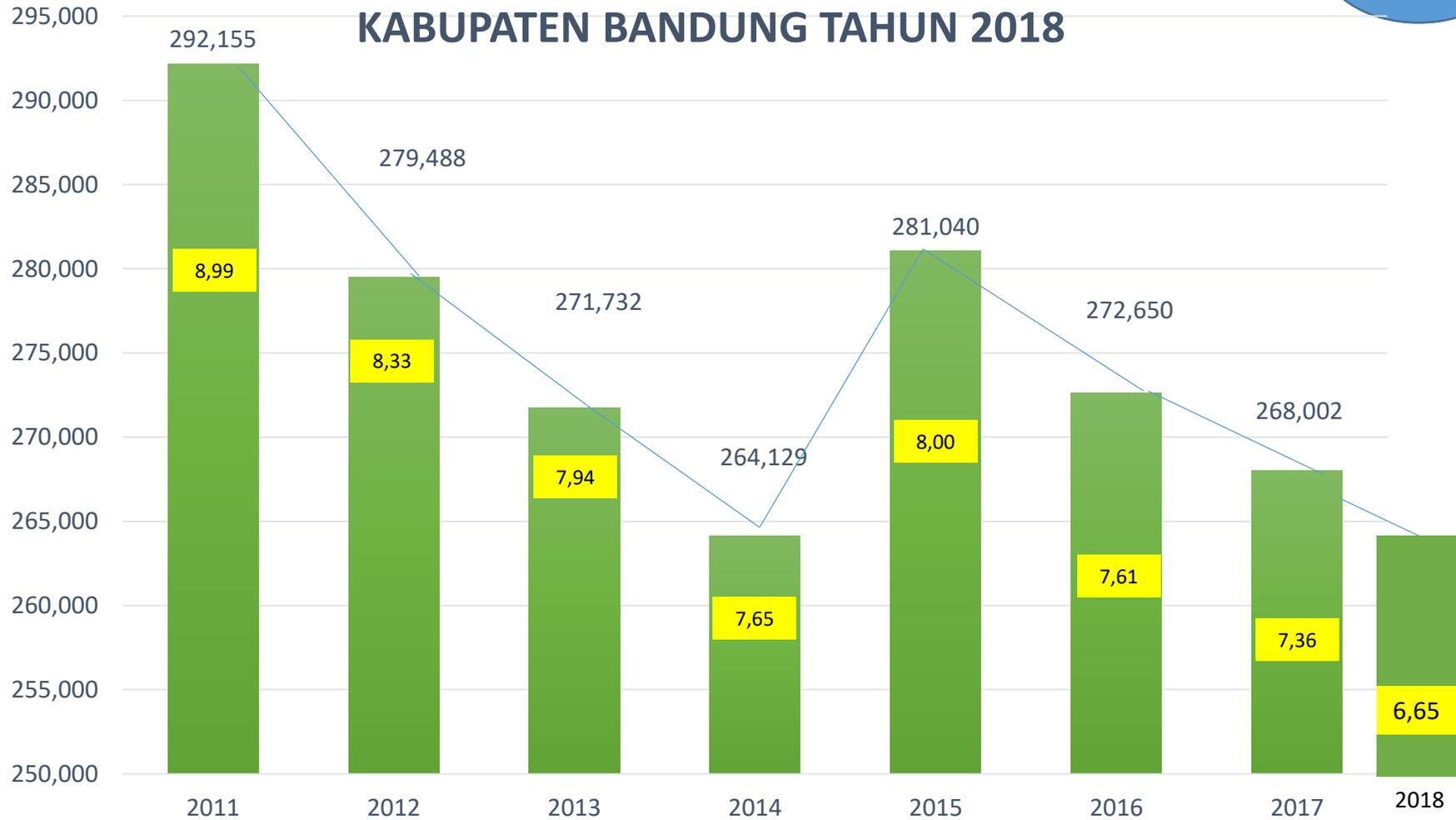


# EVALUASI CAPAIAN IKU TAHUN 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target	
					2019	2020
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,35	71,75	100,56	71,84	72,32
2	Tingkat Kemiskinan	7,13	6,65	106,73	6,9	6,68

# JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

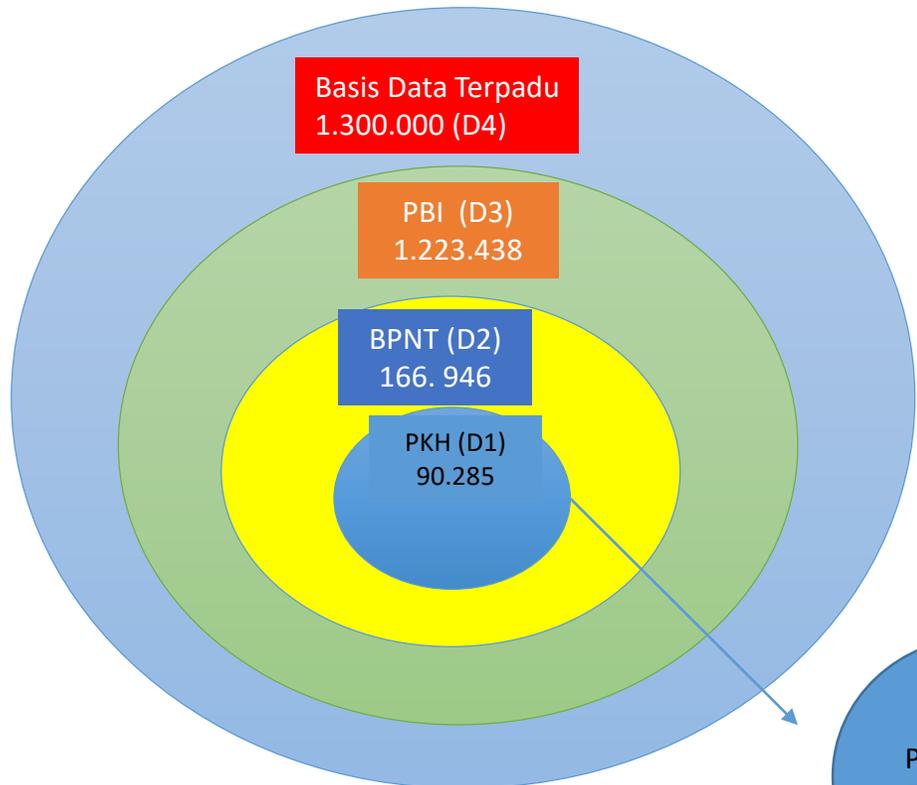
DATA  
BPS



Target  
RPJMD  
2018 6,9



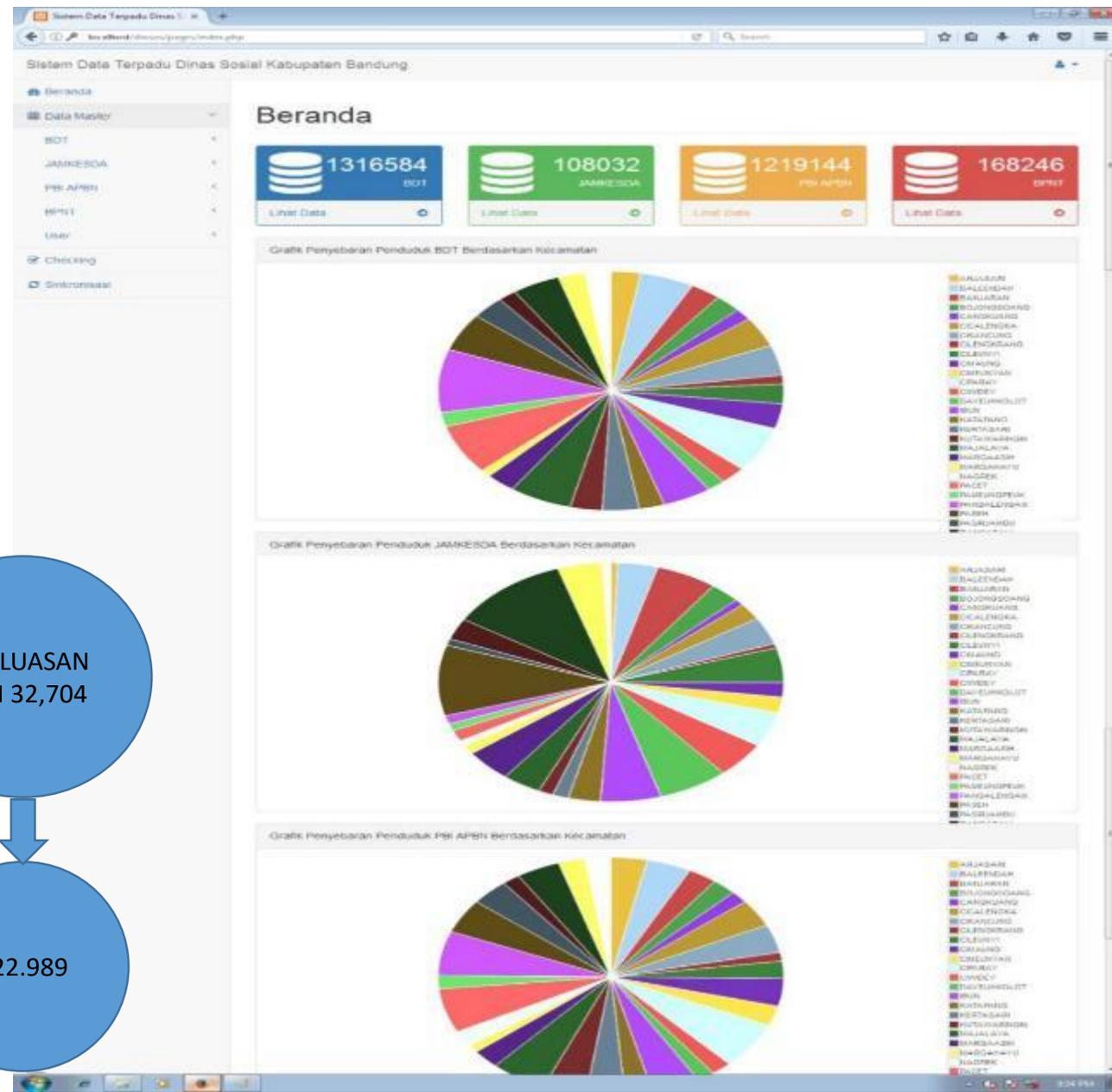




DATA YANG TERUPDATE DI SLRT PK SABILULUNGAN

PERLUASAN PKH 32,704

122.989



# STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

# PENDANAAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**ALOKASI DANA  
PERIMBANGAN  
DESA (ADD)**

**DANA DESA  
(DD)**

**KABUPATEN**

**PROVINSI**

**PUSAT**

**DUNIA  
USAHA  
(CSR)**

# KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

# KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN :

- TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG DIDALAMNINYA TERDAPAT *SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN ( KOORDINATOR LAPANGAN/TIM REAKSI CEPAT TRC TKPK KABUPATEN BANDUNG*
- *PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERADA DI 270 DESA DAN 10 KELURAHAN*

1

Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Perpres Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

**Bagan Struktur Organisasi  
Tim Koordinasi Penanggulangan  
Kemiskinan Kabupaten Bandung**

**PENANGGUNG JAWAB**  
BUPATI BANDUNG

**KETUA**  
WAKIL BUPATI BANDUNG

**WAKIL KETUA**  
SEKRETARIS DAERAH

**SEKRETARIS**  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

**WAKIL SEKRETARIS**  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA

**KELOMPOK PROGRAM BANTUAN  
SOSIAL TERPADU BERBASIS  
KELUARGA**  
**KETUA**  
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
**WAKIL KETUA**  
KEPALA DINAS SOSIAL  
**ANGGOTA**

**KELOMPOK PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**KETUA**  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA  
**WAKIL KETUA**  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
**ANGGOTA**

**KELOMPOK PROGRAM BERBASIS  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN  
KECIL**  
**KETUA**  
ASSISTEN PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN  
**WAKIL KETUA**  
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
**ANGGOTA**

**SEKRETARIAT  
KETUA**

SEKRETARIS  
BADAN  
PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN  
DAERAH

**ANGGOTA**

**POKJA  
PENDATAAN  
DAN SISTEM  
INFORMASI  
KETUA**

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA  
DAN STATISTIK

**WAKIL KETUA**  
KEPALA BIDANG  
BADAN PUSAT  
STATISTIK

**ANGGOTA**

**POKJA  
PENGEMBANGAN  
KEMITRAAN  
KETUA**

KEPALA BIDANG  
PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN  
PEREKONOMIAN  
PADA BADAN  
PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN  
DAERAH

**WAKIL KETUA**  
KEPALA SUB  
BAGIAN PADA  
KOORDINASI  
PEREKONOMIAN  
SETDA

**ANGGOTA**

**POKJA  
PENGADUAN  
MASYARAKAT  
KETUA**

KEPALA BIDANG  
DI DINAS  
PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT  
DESA

**WAKIL KETUA  
MANAJER SLRT**

**ANGGOTA**

POSISI SLRT PK  
SABILULUNGAN

**Perpres No. 15 tahun 2010** tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan  
**Perda No. 10 Tahun 2008** Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung

# PERAN STRATEGIS TKPKD KABUPATEN BANDUNG



2

# PROFIL SLRT PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN KABUPATEN BANDUNG

## LATAR BELAKANG

1. Penanganan Masalah Kemiskinan maupun Masalah Sosial Lainnya masih bersifat sektoral dan parsial/masing-masing Perangkat Daerah
2. Penanganan Masalah Kemiskinan cenderung masih bersifat bersifat *fragmentaris, sektoral, reaktif dan belum melembaga.*
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh *pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu.*
4. Indonesia No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin telah menyatakan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang *terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau Masyarakat.* Kebutuhan dasar adalah *kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/ atau pelayanan sosial*

REGULASI

# REGULASI DAERAH TENTANG SLRT

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
3. PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN
4. PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU DI LUAR PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENERIMA SKTM KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
4. PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
5. PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
6. KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 465/KEP.687-DINSOS/2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNSUR PELAKSANA SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN
7. KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR 463/8165/DINSOS TENTANG PENUNJUKAN UNSUR PELAKSANA SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN
8. SURAT EDARAN KA. DINSOS NO. 463/2244/DINSOS TAHUN 2017 TENTANG PENJELASAN PUSKESOS

# REGULASI DAERAH 2018 TENTANG SLRT

1. **PERATURAN BUPATI NOMOR PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018** TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
2. PEUBAHAN **PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2016** TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU DI LUAR PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENERIMA SKTM KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG( **ORANG TERLANTAR DAN ODGJ**)
3. **PERBUB NOMOR 65 TAHUN 2017** TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018
4. **INSTRUKSI BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2018** TENTANG SINERGI PEMBANGUNAN PERDESAAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018
5. PERDA SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU , DI USUNG OLEH DPRD  
( RAPERDA INISIATIF DPRD )
6. **DRAFT PERBUB SOP “ INTEGRASI LAYANAN P2TP2A DENGAN SLRT**  
(PROSES PENANDATANGANAN)



PENETAPAN PERDA SLRT DI  
PARIPURNA DPRD HARI KAMIS  
TANGGAL 11 OKTOBER 2018

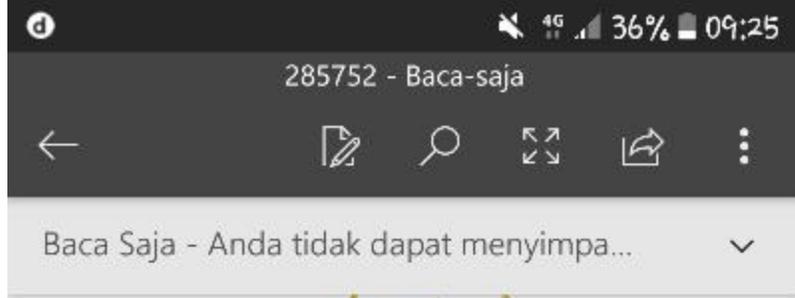
## STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL

### Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten /Kota

Tujuan untuk dilaksanakan secara dini

Tuntutan publik





BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK  
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK  
MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi fakir miskin dan orang tidak mampu serta dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial, diperlukan upaya nyata dalam penanganan fakir

PERDA 13 TAHUN 2018  
TENTANG SISTEM LAYANAN RUJUKAN  
TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR  
MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

## **SLRT PK SABILULUNGAN HADIR UNTUK :**

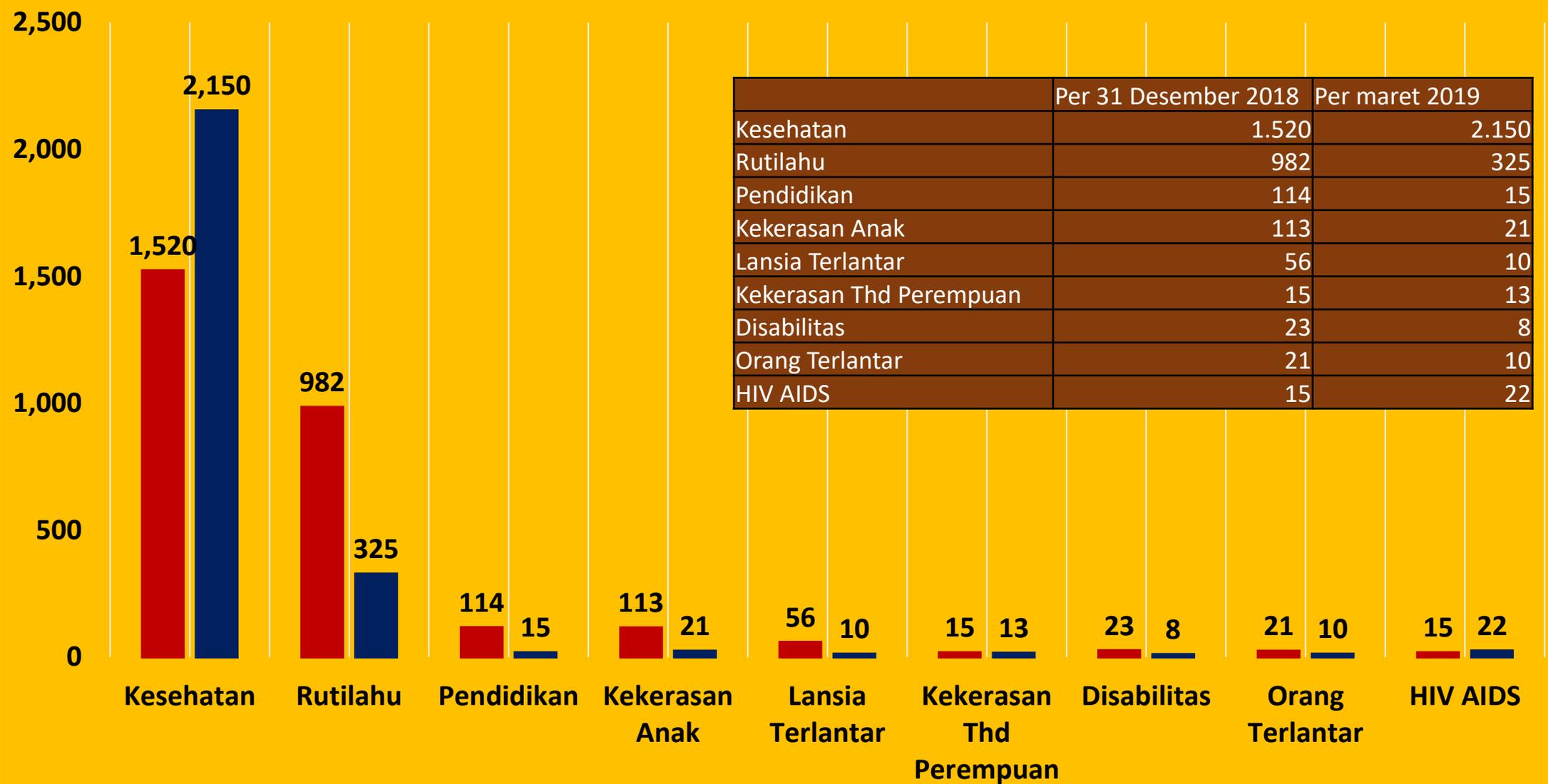
- (1) Memastikan Masyarakat itu termasuk Fakir Miskin atau Orang Tidak Mampu**
- (2) Apakah sudah Mendapatkan Akses Perlindungan dan Pelayanan sosial**
- (3) Dan apakah Program tersebut telah Terintegrasi**

**(kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/ atau pelayanan sosial kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masalah LAINNYA )**

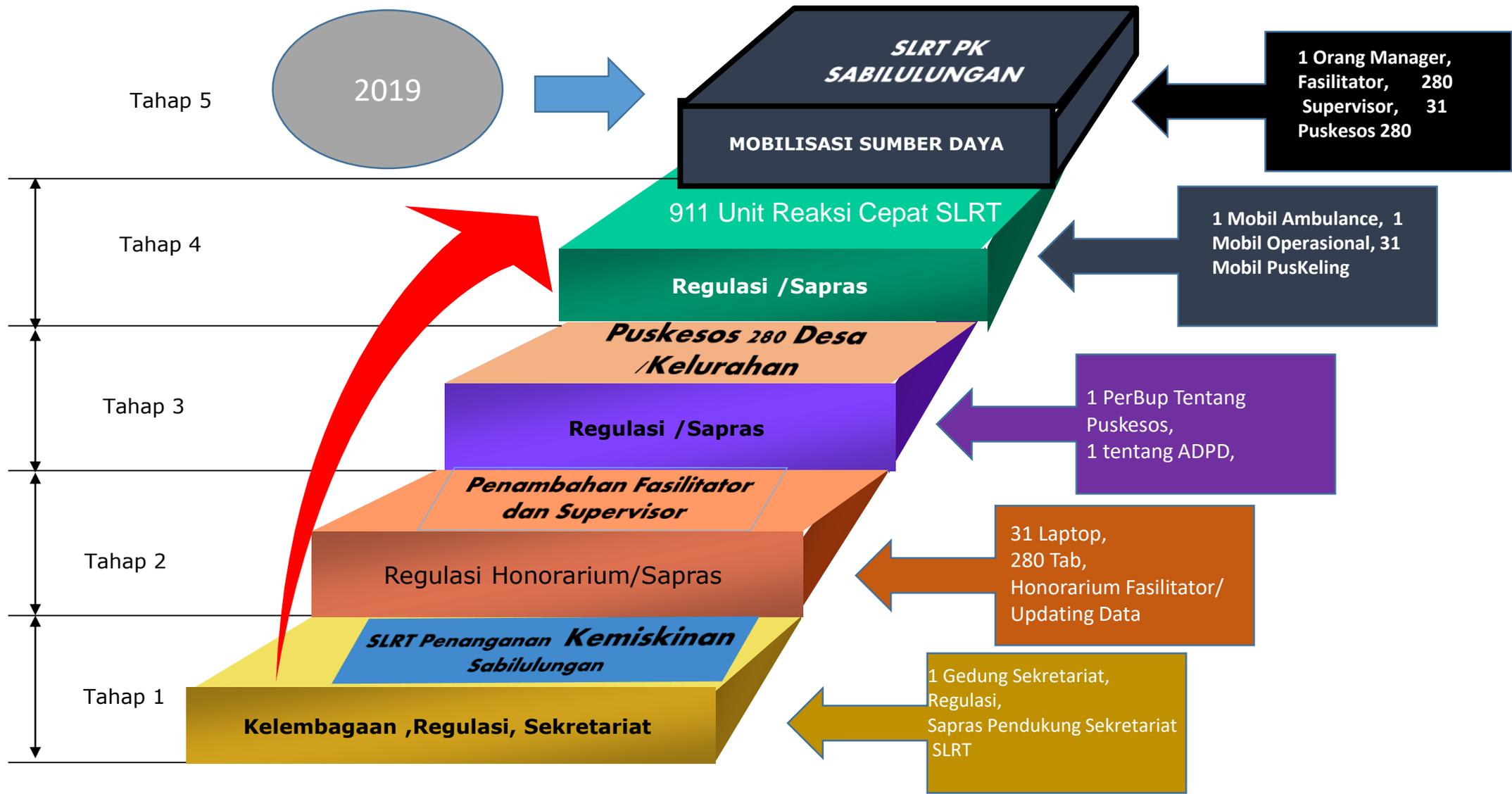


1 Manager  
1 Pendamping Daerah  
31 Supervisor  
280 Fasiitator  
1400 Penyelenggara  
Puskesos

## JUMLAH KASUS YANG DITANGANI OLEH SLRT / KATEGORI **TUNTAS**



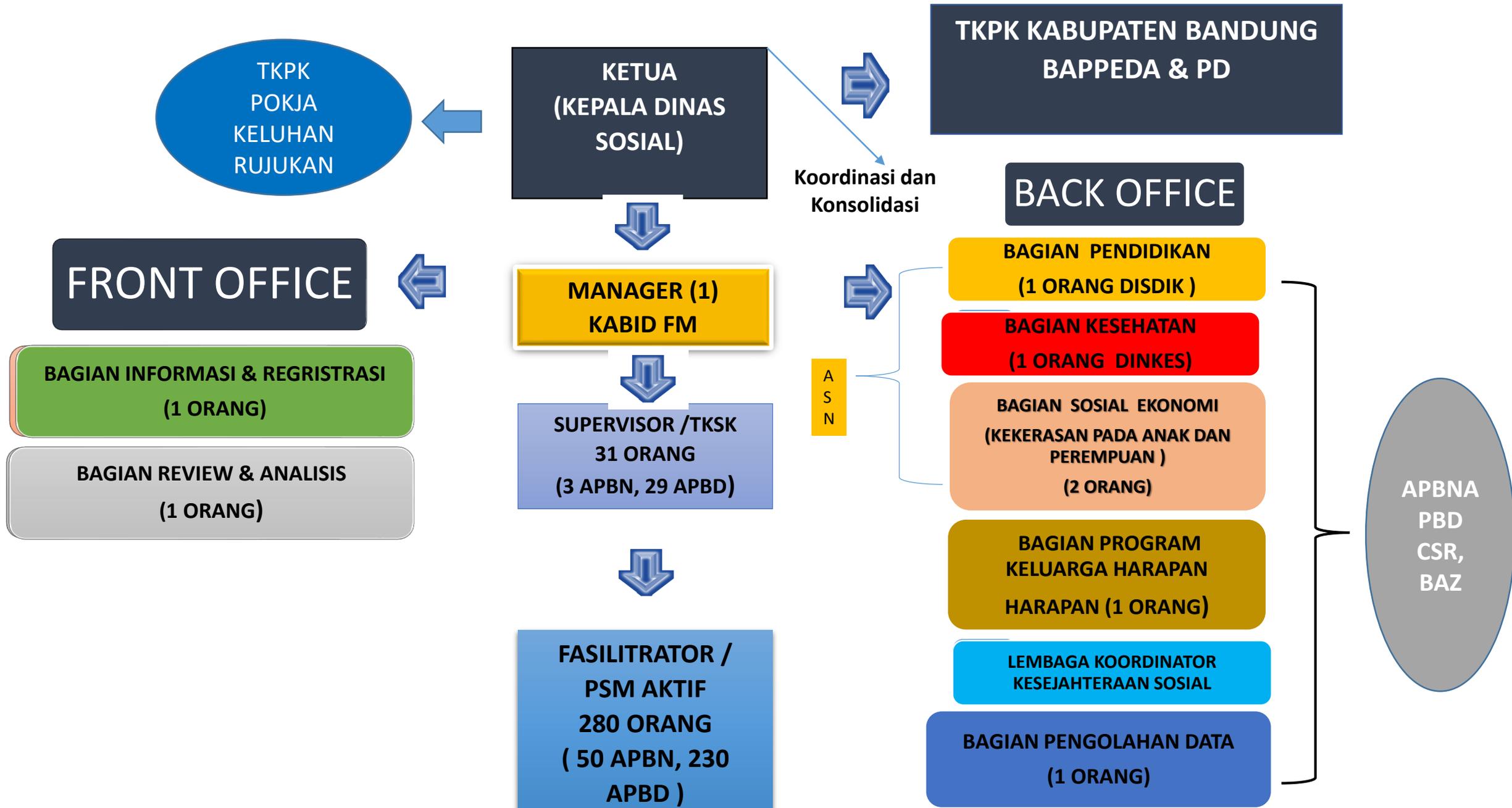
# TAHAPAN PENGEMBANGAN SISTIM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN 2019



# MEKANISME KERJA SLRT PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN



# SDM PELAKSANA SLRT PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN



# COMPLEMENTARY PROGRAMS

## CONTOH

### Perumahan

Rumah Pak Bambang dan keluarganya tidak layak huni, hanya memiliki kamar 1 dan tidak memiliki toilet APBD. APBN. CSR

### Kesehatan

Pak Bambang dan keluarganya tidak memiliki jaminan kesehatan PBI APBN dan PBI APBD, SKTM



### Perumahan

Rumah Pak Bambang dan keluarganya tidak teraliri listrik.

Pak Bambang dan istrinya tidak memiliki pekerjaan yang layak Program pemberdayaan ekonomi

### Pendidikan

Anak Pak Bambang masih usia sekolah

### Kepelembagaan

Pak Bambang dan keluarganya Belum pernah mendapatkan program dari Pemerintah (BPNT, KUBE, LISTRIK Bersubsidi dll)

# (1) ANGGARAN SLRT APBD KABUPATEN BANDUNG 2019

1

HONORARIUM 31 SUPERVISOR  
Rp 500.000/BLN X 10 BLN = Rp 155.000.000

2

HONORARIUM 280 FASILITATOR  
Rp 350.000/BLN X 10 BLN = Rp 980.000.000  
UANG PULSA RP. 50.000 X 280 X 10 BLN = 140,000,000

3

***PUSKESOS 280 Desa/ADPD  
(BOP dan SAPRAS MINIMAL 40 JUTA /Tahun) 11.2 MILYAR***

4

ANGGARAN KEGIATAN DINAS SOSIAL SLRT  
( PENINGKATAN KAPASITAS 1.M) FASILITATOR, PUSKESOS

5

***MEMBANGUN GEDUNG SLRT 5,6 MILYAR TERMASUK  
DATA CENTER***

53  
milya  
r

ANGGARAN PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAN PMKS  
TAHUN 2019

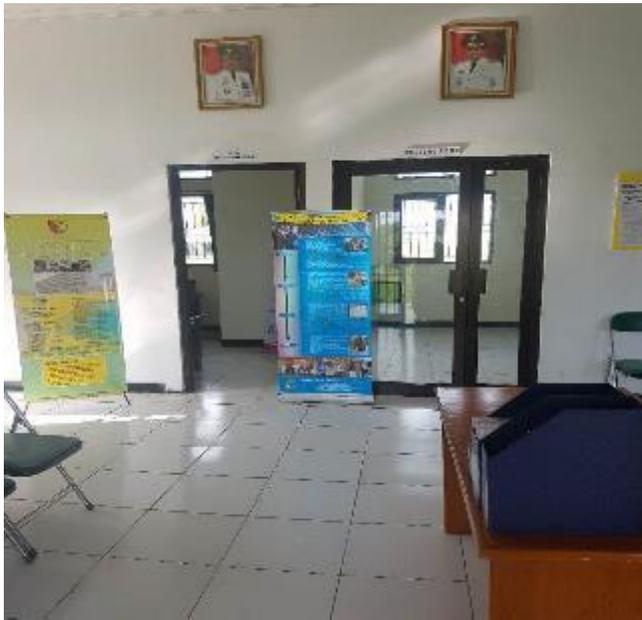
54.660.431.290,00

SARANA PRASANARA

SLRT

PK SABILULUNGAN

# SEKRETARIAT SLRT PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN JL.RAYA SOREANG KABUPATEN BANDUNG



# RUANG KONSELING ANAK / SLRT RAMAH ANAK





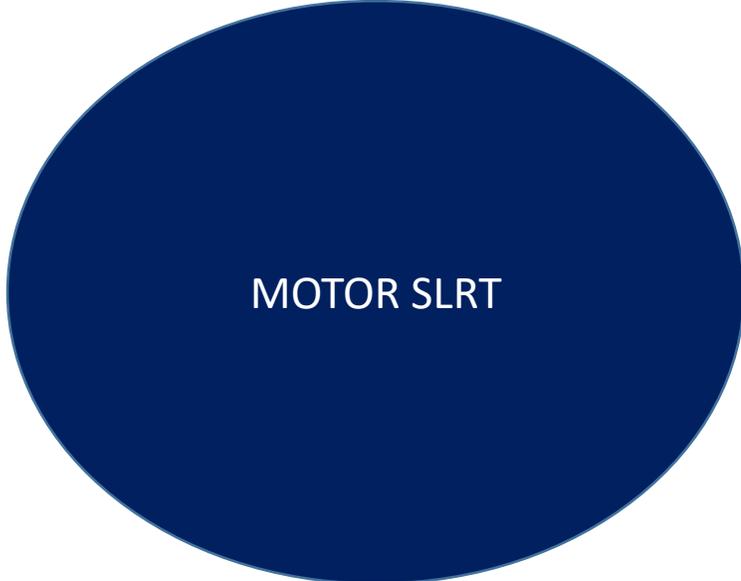


MOBIL OPERASIONAL  
SLRT





# PROGRAM MOBIL SLRT SAYANG ANAK 2018





MOBIL SISIR  
SABILULUNGAN



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

**BUS SEKOLAH**  
School Bus

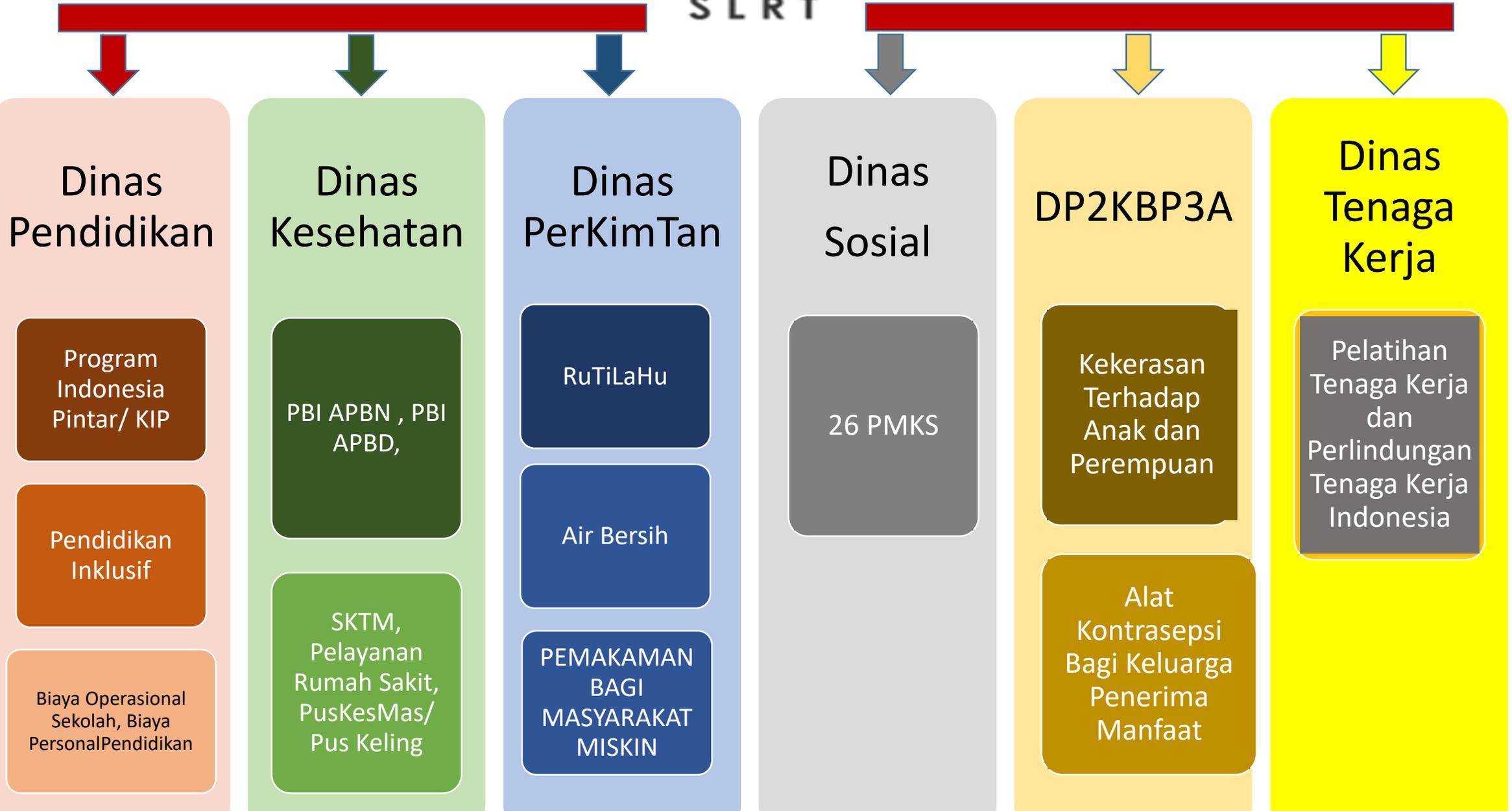
*Sabilulungan*

Semua Anak  
Bisa Sekolah

**KEMITRAAN**

# KEMITRAAN SLRT PK SABILULUNGAN

**PEMERINTAH DAERAH, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT.**



PERLUASAN  
PELAYANAN



2018

PLN

LISTRIK BAGI  
MASYARAKAT  
MISKIN  
JABAR CAANG  
2018

DISNAKER

KURSUS  
BAHASA  
INGGRIS  
DAN  
JEPANG

PROGRAM  
MAGANG

DISKOPERINDAG

GAS 3 KG

DISDUKCAPIL

SISIR  
ADMINDUK

P2TP2A

SOP  
PENANGANAN  
KEKERASAN  
ANAK DAN  
PEREMPUAN

INDAG

OPM

PERLUASAN  
PELAYANAN



2019



Dinas Pangan

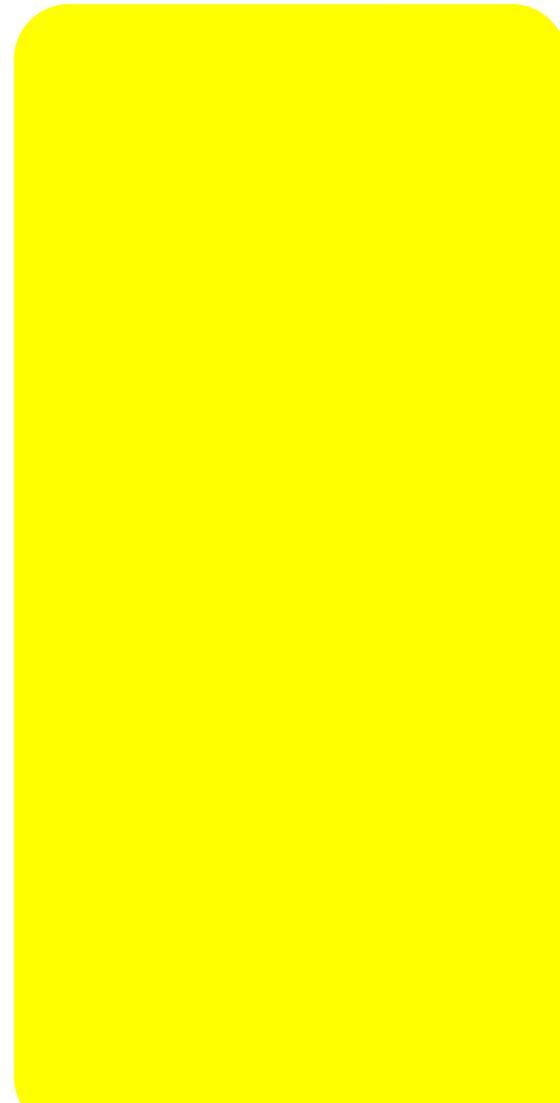
DISKOPERINDAG

UMKM

Koperasi SLRT

Pemberian  
makanan  
tambahan  
ikan

Pelatihan  
Pengemasan  
( Kube)



# JEJARING SLRT

Yayasan  
Daarut Tauhid

LSM SAPA

DOMPET DHUAFA

CSR RS  
SANTOSA

CSR RS SOREANG

LSM BAHTERA  
DAN SRIKANDI  
PATUHA

LKKS



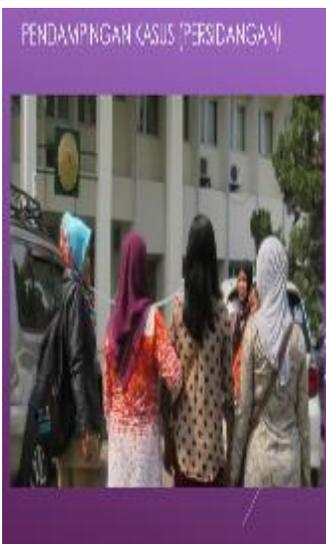
Membantu  
masyarakat  
apabila ada resep  
yang tidak  
ditebus

Membantu  
operasi  
bibir sumbing

Membantu  
sunatan  
massal

Membantu  
masyarakat  
HIV AIDS

Membantu  
Masyarakat  
Dirujuk Ke  
Yayasan /  
OrSos



# JEJARING SLRT

KOMITE MATA DAERAH



RUMAH BERSALIN CUMA CUMA



PANTI REHAB  
NAFZA BUMI  
KAHEMAN



CSR



BAZ



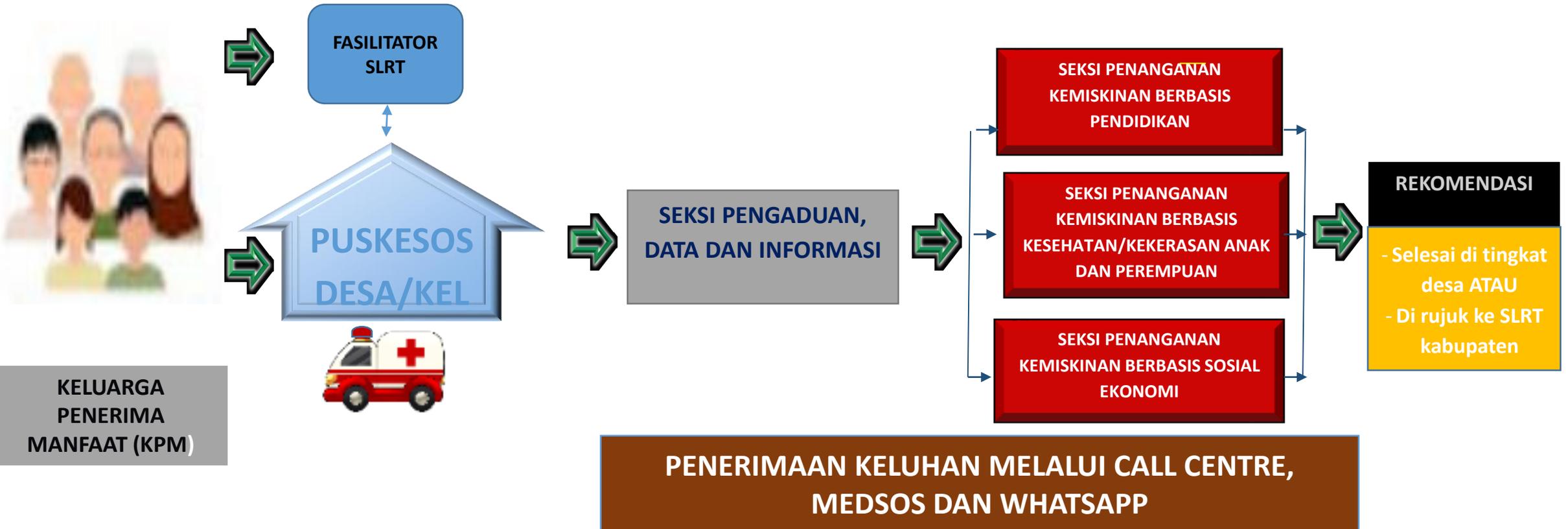
adalah *tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan di dasarkan pada pemanfaatan pelayanan pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, ekonomi dan usaha serta pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat*

Sebagai  
**MINIATUR**  
**SLRT**

*sebagai lini terdepan (front line) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi*



# MEKANISME KERJA PUSKESOS



### c. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat :

- a). penanggulangan kemiskinan, termasuk fasilitasi Sarana Prasarana dan Operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)
- b). Peningkatan Kesehatan Masyarakat meliputi
  - 1). penunjang kegiatan pelayanan pos kesehatan desa
  - 2). pelayanan KB dan Posyandu
  - 3). insentif untuk mitra bidan desa
- c). Peningkatan pendidikan dasar meliputi :
  - 1). bantuan kesejahteraan bagi guru non formal (PAUD, madrasah diniyah);
  - 2). alat peraga PAUD, bantuan beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu bantuan penyelenggaraan Program Paket Belajar di madrasah
- d). pembangunan/pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa
  - 1). kegiatan penyediaan air bersih (Pivanisasi, air resapan/ sumur resapan)
  - 2). kegiatan penyediaan WC Umum/ MCK
  - 3). kegiatan pengelolaan persampahan mandiri di desa
    - Pembuatan Gerobak Sampah/Beca Motor (Cator)
    - Pembuatan tempat sampah sementara (TPS) atau TPST
  - 4). kegiatan penyediaan sumur resapan/biopori serta penunjang kegiatan lingkungan hidup lainnya dalam skala desa (hutan lindung desa - tanaman hortikultura) : Misal : Jeruk sabulungan)
  - 5). kegiatan pembangunan/rehabilitasi jalan/gang/lingkungan (skala desa)

**RINCIAN BELANJA  
PUSKESOS , ADPD  
2019 (40 JUTA)**



4G 69% 12:55



Baca Saja - Anda tidak dapat menyimpa... ▾



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA  
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung.

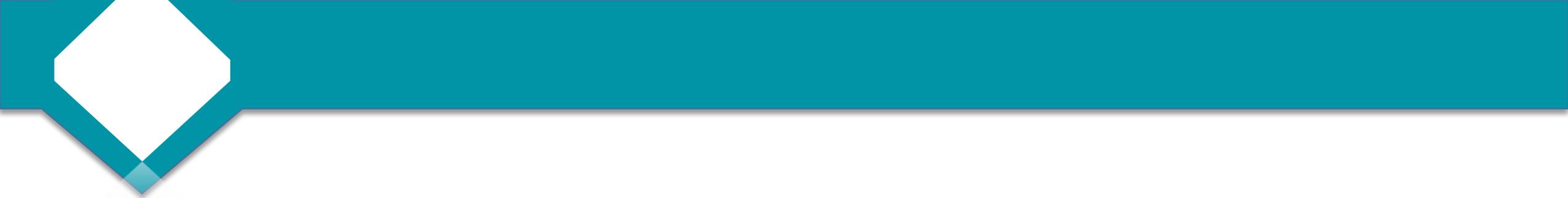
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);

(2) Sisa dari Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :

- a. penanggulangan kemiskinan, termasuk fasilitasi sarana, prasarana dan operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos);
- b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat, melalui kegiatan :

# Progres

- Komitmen pelaksanaan semua program/kegiatan menggunakan BASIS DATA TERPADU yang berada di SLRT Dinas Sosial Kabupaten Bandung , dengan melakukan updating data SIKS NG oleh 280 Puskesmas Desa dan Kelurahan
- menggunakan APBDes untuk keperluan penanggulangan kemiskinan yang tidak tercover oleh Anggaran Kabupaten/Provinsi/Pusat
- Sinergitas antara program pemerintah baik ditingkat Kabupaten/Provinsi/Pusat dengan program/kegiatan yang ada di tingkat desa



# **DOKUMENTASI KEGIATAN**



**IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN  
KELUHAN, SERTA  
RUJUKAN;**

# PERAN AKTIF DINAS KESEHATAN & TIM SLRT KABUPATEN BANDUNG SEBAGAI BAGIAN DARI PENANGANAN RUJUKAN SLRT



# PERAN AKTIF DINAS KESEHATAN & TIM SLRT KABUPATEN BANDUNG SEBAGAI BAGIAN DARI PENANGANAN RUJUKAN SLRT





SLRT DAN TRC KEMENSOS  
PENANGANAN PASIEN  
JIWA



EVAKUASI PASIEN  
OLEH PUSKESOS

←  Ricky  
mau se... cerita... menit yang lalu

dia gani anak berusia 8 tahun yang sekarang duduk dikelas 2 sd, dia seorang anak laki-laki yang slalu ceria dan pantang menyerah. diapun bisa dibilang sebagai kaki dari keluarganya, karena memang hanya dia yang mampu berjalan dengan normal diantara semua keluarganya dan bisa dibilang dia terlahir dari keluarga yang kurang berkecukupan (maaf agak terlalu kasar, karena saya bingung harus menjelaskan dengan kosa kata yang seperti apa). kini masa depannya terancam, kini senyum yang slalu diperlihatkan perlahan musnah, yaAllah berat sekali saya menulis cerita ini:)

**#salampedul**

**#jikabukankitasiapalagi**



akibat dari ganasnya radiasi hp ini, kini ia sering merasakan sakit dibagian kepala, batuk yang tiada henti bahkan menangis darah, tak banyak kata yang bisa saya ucapkan, hanya saja hati ini terasa sakit melihat anak laki-laki yang masa depannya masih panjang harus menanggung beban seberat ini. dari itu bila rekan-rekan dan teman-teman semua terketuk hatinya untuk menyisihkan sebagian rezkinya untuk kesembuhan gani, saya amat #salampedul hati menerima bantuan saudara. jikapun rekan-rekan dan teman-teman ingin langsung menjumpai gani bisa datang ke kp. babakan jeungjing Rt05 Rw03 desa cangkuyur kec.rancaekek

BALAS



# VISIT LAPANGAN





# VISIT LAPANGAN



# PENANGANAN ORANG TERLANTAR



# PENANGANAN ANAK TERLANTAR



# PENANGANAN KASUS ANAK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU KARENA LUKA BAKAR



# PENANGANAN MASYARAKAT TERLANTAR



1. Laporan Masyarakat kepada Fasilitator SLRT
2. Fasilitator melaporkan melalui Hotline Service SLRT
3. Unit Reaksi Cepat (URC) SLRT menjemput Orang Terlantar untuk dirawat di Rumah Sakit
4. Setelah sehat dirujuk ke Panti Jompo

# PENANGANAN MASYARAKAT DISABILITAS



1. LAPORAN MASYARAKAT KEPADA FASILITATOR SLRT
2. FASILITATOR MELAPORKAN MELALUI HOTLINE SERVICE SLRT SEKALIGUS MENGUNJUNGI PENYANDANG DISABILITAS DAN MELAKUKAN ASSESMENT (MISALNYA TIDAK MEMILIKI KIS, POLA PENGASUHAN, RUTILAHU, ALAT BANTU, DAN LAIN SEBAGAINYA)
3. MELAPORKAN KE SEKRETARIAT SLRT UNTUK DIRUJUK SESUAI KEBUTUHAN

# PENANGANAN LANJUT USIA



# PENANGANAN ORANG TERLANTAR SLRT DENGAN PUSKESOS DAN PKM



# PENANGANAN RUTILAHU

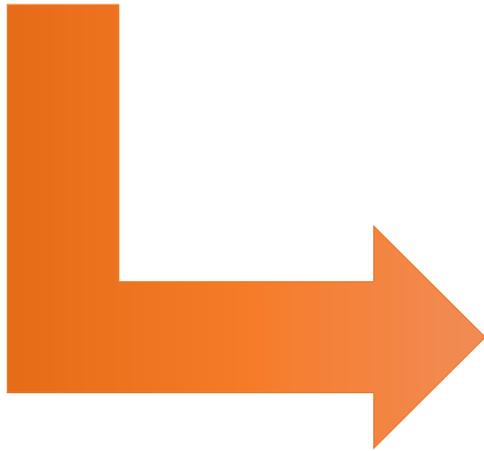
SEBELUM



SESUDAH



# LOKASI RUTILAHU BERDASARKAN TITIK KOORDINAT



## GeoCam Report

ATAP ROBOH.jpg  
JIJ00020.jpg  
18/03/17 11.07  
2017:03:18 04:07 UTC

BENCANA  
KP. PANGARITAN RT 4 RW 4

	Latitude	Longitude	Altitude	Azimuth	Pitch	Roll
S	57,010545'±3m	E107,501591'±3m	798m±3	120°±0	0°±0	0°±0



KEJADIAN TANGGAL 18/03/2017, BENCANA ATAP ROBOH DIKHAWATIRKAN MENIMPA RUMAH DISEKITARNYA.

MAHFUZH AM  
ATAP ROBOH.jpg (1/1)

18/03/17 11.11  
OPPO A11w (A11w) 4.4.2 GeoCam 2.10.1316

MARET  
2018

# PENANGANAN SLRT TERHADAP MIGRAN DI MALAYSIA



# FASILITATOR SLRT





FASILITATOR ANGKATAN  
TERAKHIR 70 DESA  
TAHUN 2018

PUSKESOS  
DI KABUPATEN BANDUNG  
BERJUMLAH 280 TERDIRI DARI :

270 DESA DAN 10 KELURAHAN





FOTO KEGIATAN FS DAN  
PUSKESOS PENDAMPINGAN  
KORBAN





# KOLABORASI PENANGGAPAN KEKERASAN TERHADAP ANAK



# MEKANISME PELAPORAN KORBAN KEKERASAN SEKS PADA ANAK-ANAK

Keluarga kecil memiliki sepasang anak



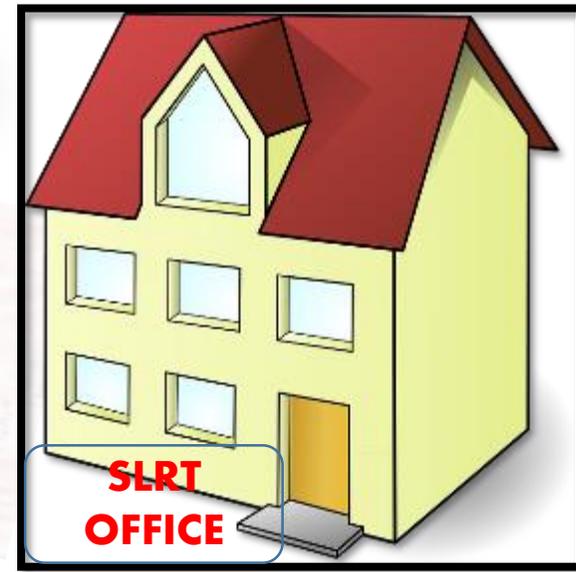
Anak mendapatkan pendidikan yang layak



Terjadi kekerasan seks pada anak-anak di bawa umur, sehingga terjadi Masalah dan dilaporkan ke SLRT



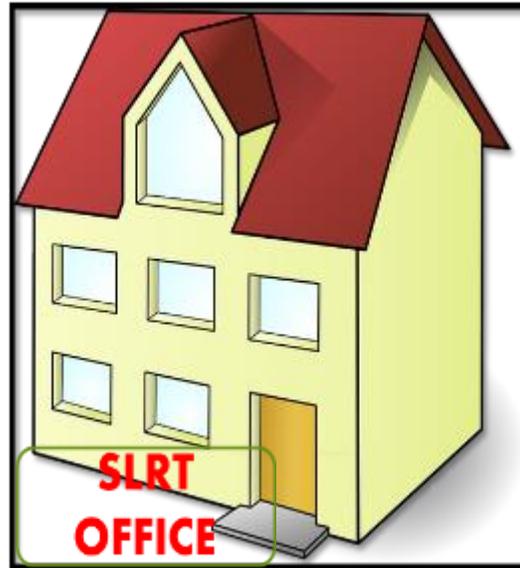
Identifikasi masalah oleh petugas sakti peksos yang ada di SLRT,  
✓ Ternyata korban hamil, petugas melakukan pendampingan sampai melahirkan dibuatkan SKTM sampai ibu dan bayi sehat



# LANJUTAN...

Setelah ibu bayi cukup kuat dan bayi di pastikan sehat dan normal, disarankan serta di dampingi untuk di ikut sertakan di dalam ujian kesetaraan maupun mengikuti kursus lainnya dalam meningkatkan keterampilannya ( 6 BULAN S/D 1 TAHUN )

Kemudian di rujuk untuk mendapatkan Berbagai bantuan komplementaris seperti bantuan : KUBE WRSE,RTLH, KIS, KIP Dan lain-lain



Sehingga di pastikan ibu bayi bisa memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan

Selain itu pendamping (Fas dan SV) SLRT mencermati kondisi keluarga korban, baik dari sisi lingkungan, kesehatan, ekonomi dan permasalahan sosial lain nya

# INFORMASI YANG TERDAPAT PADA DATA TERPADU



## IDENTITAS RTS

- Nama Kepala RTS
- Alamat/SLS
- Desa
- Kecamatan
- Kabupaten/Kota
- Provinsi
- Jumlah Anggota RTS



## DEMOGRAFI

- Nama anggota RTS
- Hubungan dengan Kepala RTS
- Jenis kelamin
- Tanggal Lahir
- Umur
- Status perkawinan
- Kepemilikan kartu ID
- No. Induk Kependudukan (NIK)
- Akte/Buku Nikah
- Akte Cerai
- Akte Kelahiran



## KEPESERTAAN PROGRAM

- PKH
- Rastra
- Jamkesmas
- Asuransi kesehatan lain
- Jamsostek
- KKS
- KIP
- BPJS/KIS



## PERUMAHAN

- Status penguasaan bangunan tempat tinggal
- Luas lantai
- Luas bangunan
- Jenis lantai
- Jenis dinding
- Jenis atap
- Sumber air minum
- Cara memperoleh air minum
- Sumber penerangan
- Kelas daya listrik terpasang
- Bahan bakar/energi memasak
- Tempat buang air besar
- TPA tinja
- Kamar tidur



## KESEHATAN

- Jenis cacat
- Penyakit kronis menahun
- Status kehamilan wanita
- Penggunaan alat KB



## PENDIDIKAN

- Partisipasi sekolah
- Kelas/jenjang tertinggi
- Ijazah tertinggi
- Status sekolah (negeri/swasta)



## KEPEMILIKAN ASET

- Mobil
- Sepeda Motor
- Perahu Motor
- Kapal Motor
- Sepeda
- Perahu
- Lemari es
- Tabung gas
- Penguasaan lahan
- Kepemilikan ternak
- Emas
- HP
- TV



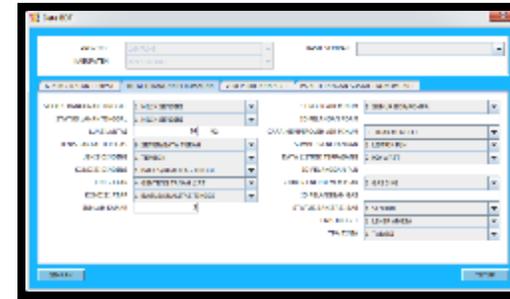
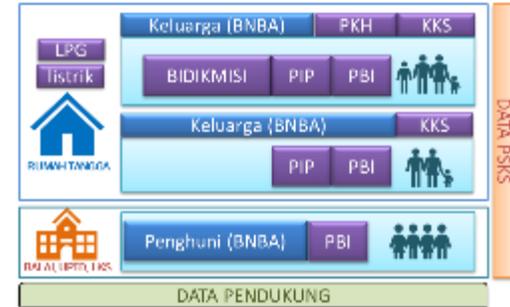
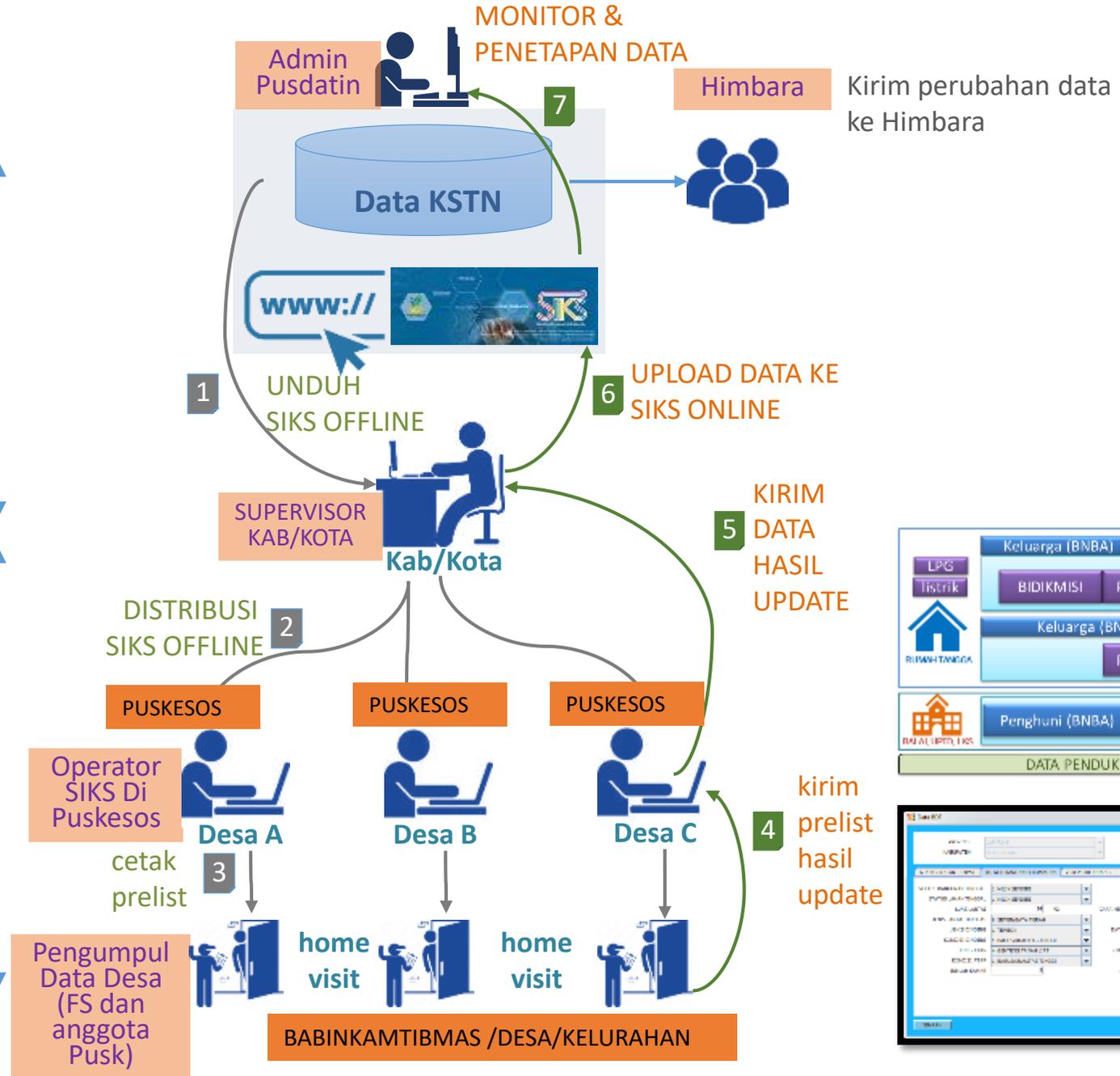
# SIKS-NG Verivali

(BANSOS PANGAN & DT PPFM)

BABIN KAMTIBMAS  
DI  
241/DESA/KELURAHAN

SIKS-NG Online

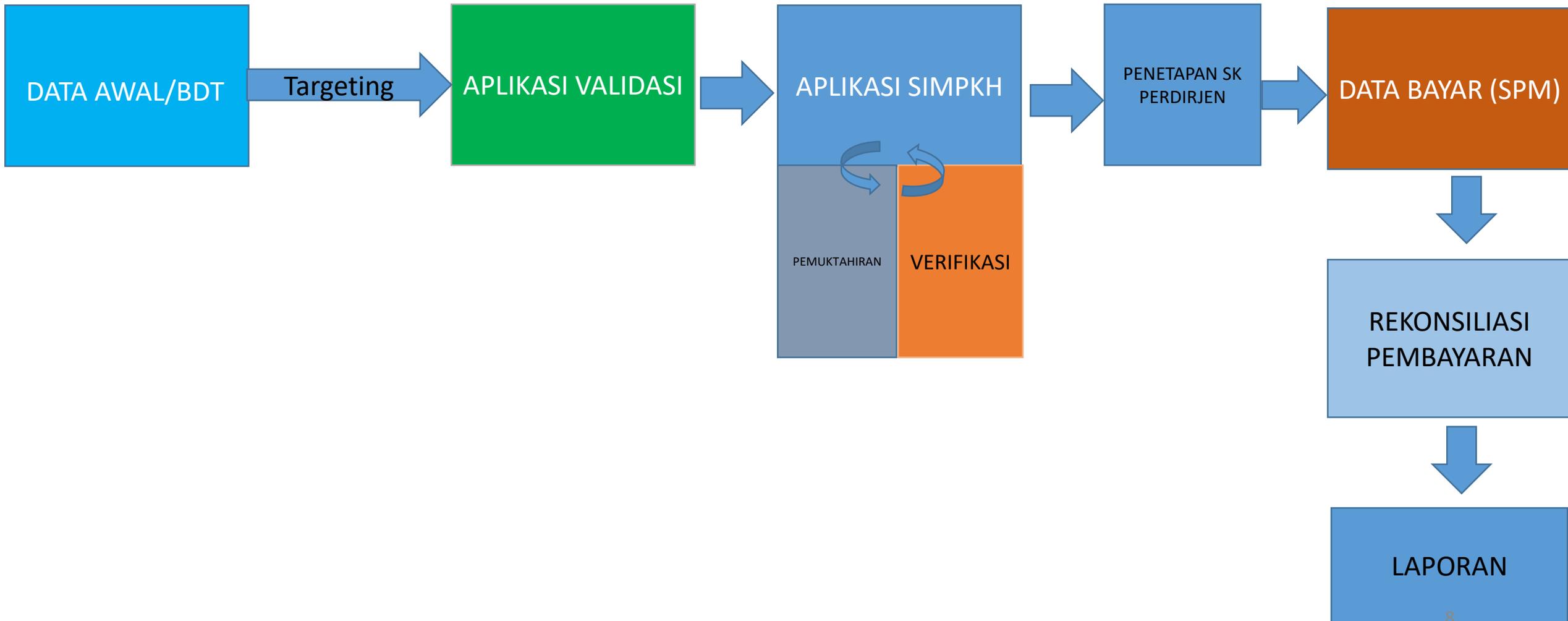
SIKS-NG Offline



# KEGIATAN DI LINGKUP KAB/KEC/DESA



# ALUR PROSES DATA PKH





PETUGAS  
VERIVALI/PUSKESOS



DINAS SOSIAL KAB. BANDUNG  
PUSKESOS BUMIHARMONI  
DESA BUMIWANGI

# VERIVALI







PUSKESOS



PUSKESOS TERSEBAR DI 270  
DESA DAN 10 KELURAHAN

ONE PUSKESOS ONE  
PRUDUCT  
ONE PUSKESOS ONE  
REINVEINTING  
ONE PUSKESOS ONE  
KUBE



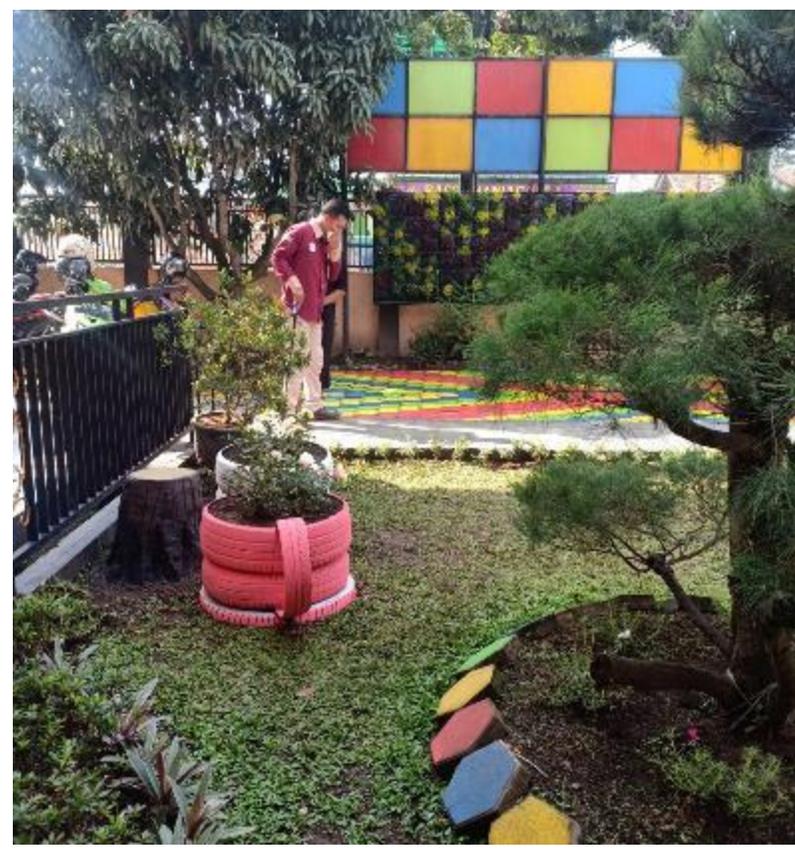
**SEKRETARIAT PUSKESOS**  
**SABILULUNGAN**

**DESA :**

**KECAMATAN :**

**ALAMAT**

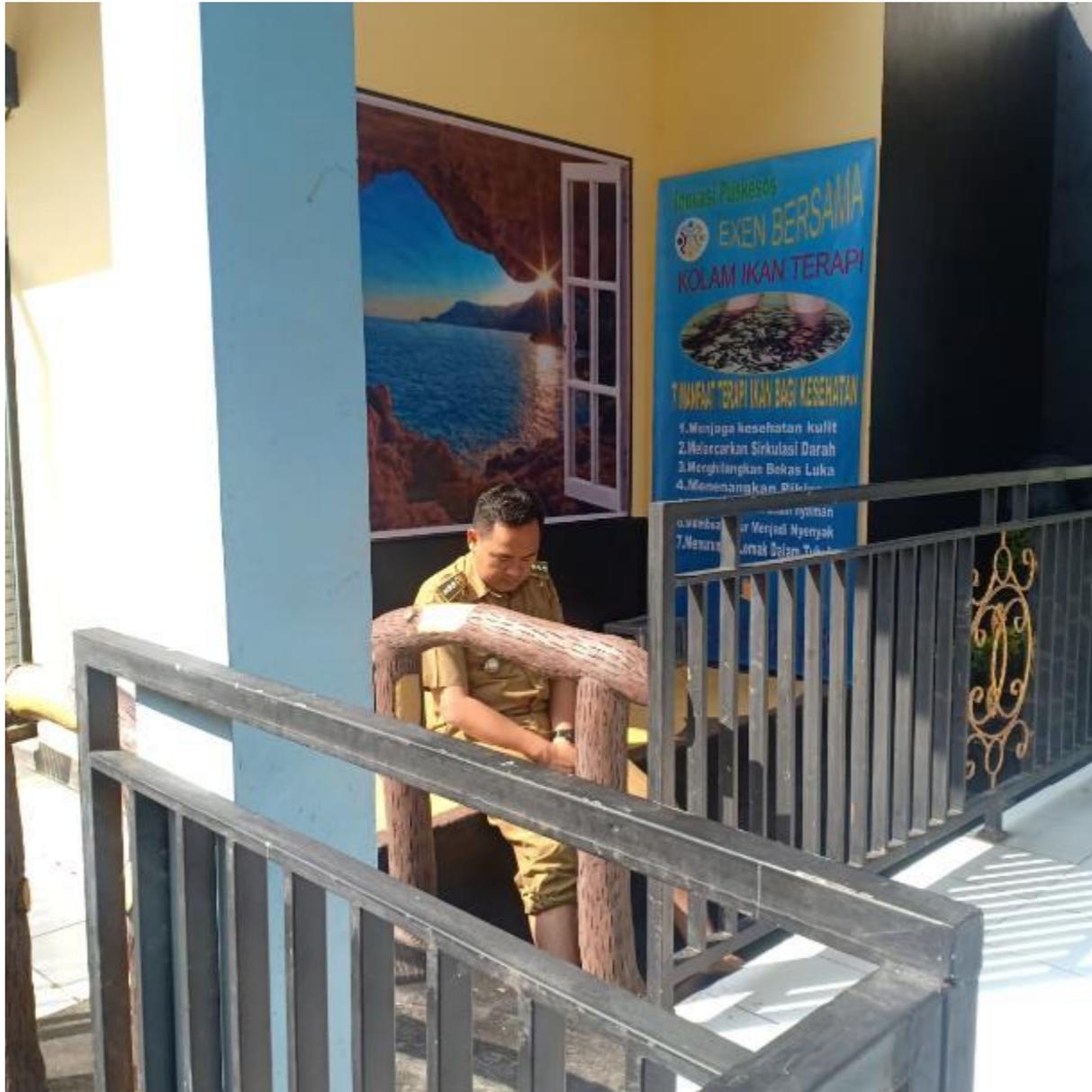








# PUSKESOS RANCAEKEK





PUSKESOS ASSALAM



# PUSAKA

## OFFICIAL MERCHANDISE

WA : 082101825 6034 / 0856 5972 6718

PUSAKA : PUSKESOS DESA KATAPANG

**Menerima Pesanan :**

- Buku Administrasi Puskesmas
- Sticker KPM
- ID Card / Name Tag
- Seragam Puskesmas
- T-Shirt
- Sablon
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Kalender
- Gantungan Kunci
- Dll.



KEWIRAUSAHAAN PUSKESOS

KETUA  
PUSKESOS DESA  
BOJONGSOANG





PUSKESOS  
BOJONG SOANG

# WIRUSAHA SLRT PK SABILULUNGAN

# ENTREPRENEURSHIP SLRT



# SOSIALISASI SLRT KEPADA MASYARAKAT







KAOS PUSKESOS  
2019

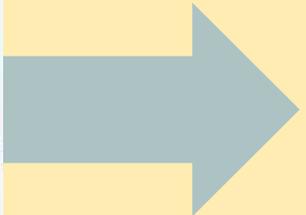
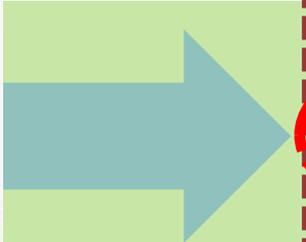


DAMPINGAN KUBE TERNAK DOMBA OLEH PUSKESOS DAN FASILITATOR



KOMITMEN  
EXIT  
STRATEGY  
2019

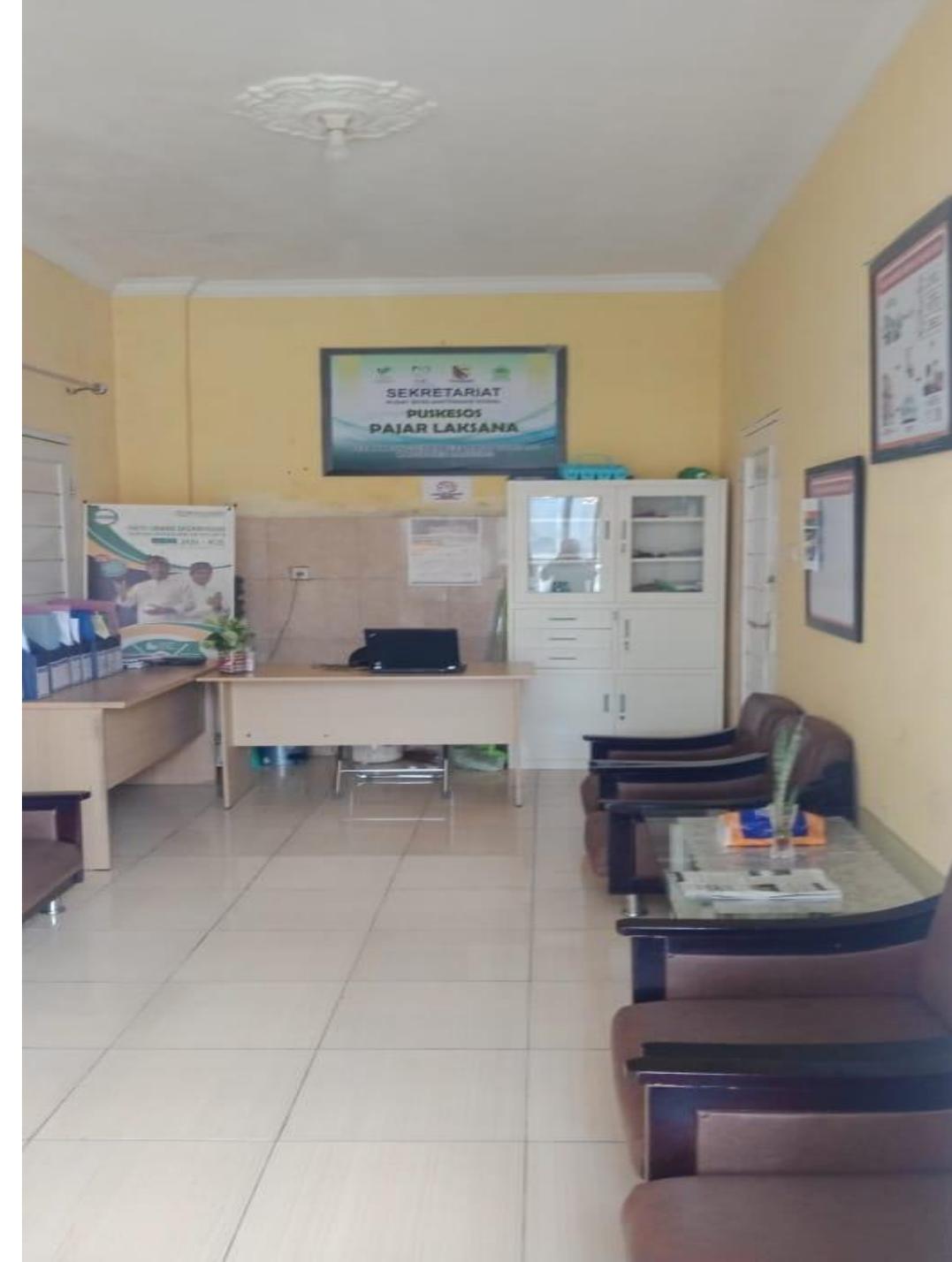
**PEMERINTAH DAERAH BERKOMITMEN UNTUK MENYEDIAKAN SUMBER  
PENDANAAN YANG KEBERPIHAKAN TERHADAP KELANJUTAN PROGRAM  
SLRT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PELAYANAN PENCAPAIAN PENANGANAN  
KELUHAN DAN RUJUKAN SELAMA INI**



# SDGs

- TANPA KEMISKINAN
- TANPA KELAPARAN
- KESEHATAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN
- PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS
- KESETARAAN GENDER

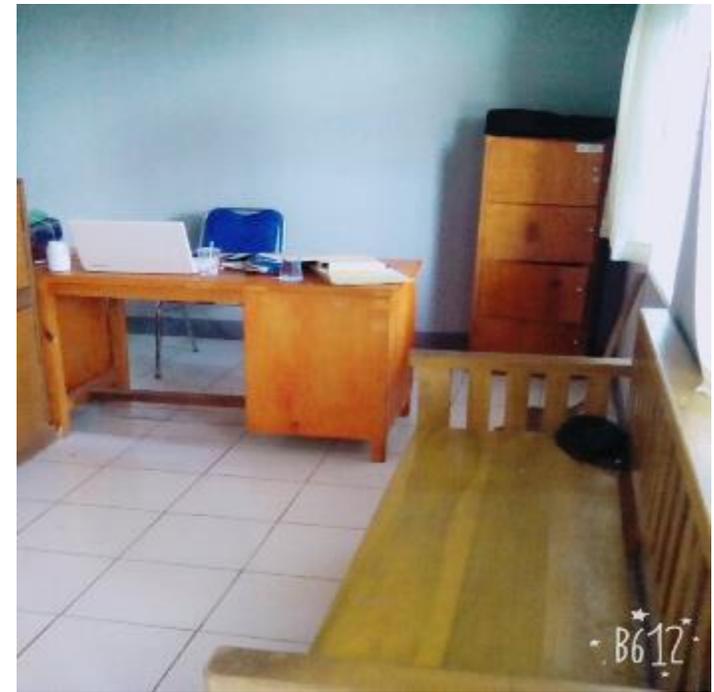
SAPRAS PUSKESOS



PUSKESOS  
PAJAR LAKSANA



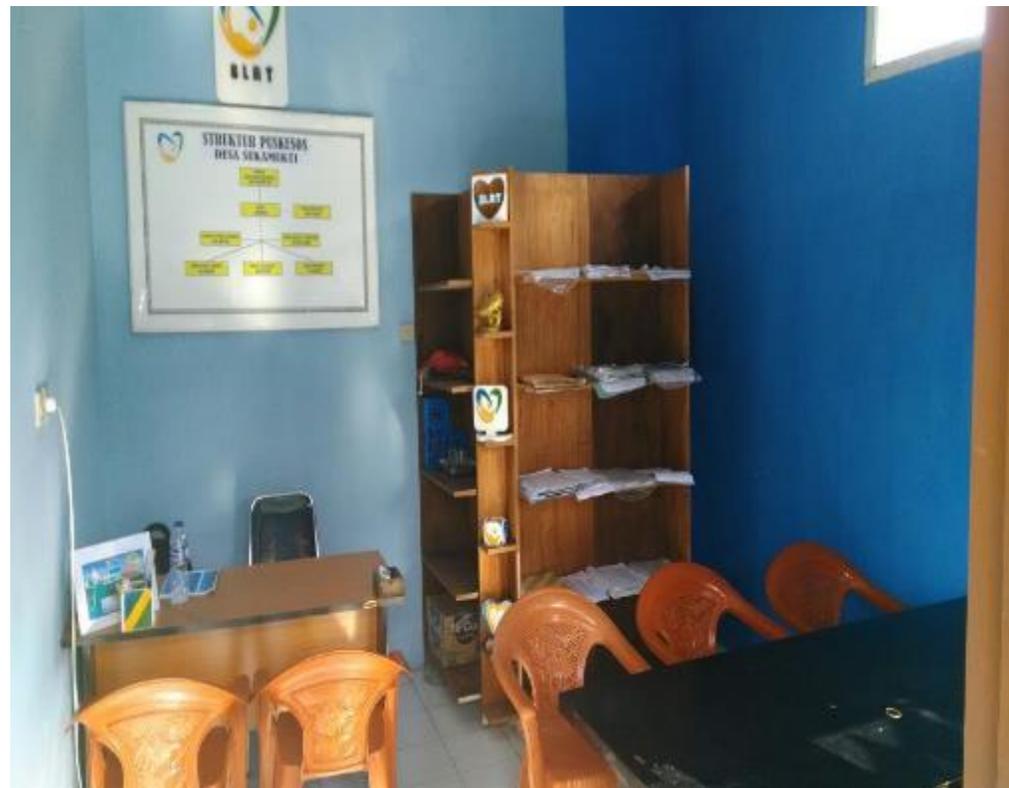




# PUSKESOS DESA RAWABOGO KECAMATAN CIWIDEY



# PUSKESOS DESA SUKAMUKTI KECAMATAN KATAPANG









PUSKESOS  
GAMBUNG  
WALAGRI



# SEKRETARIAT PUSKESOS











**PUSKESOS  
BUMI  
HARMONI**













PUSEKESOS ASSALWA





**PERAN AKTIF  
KEPALA DESA**



PERAN AKTIF  
KEPALA DESA



# PENGHARGAAN PUSKESOS PALING PROGRESIF TAHUN 2017





KEPALA DESA  
SUKAMAJU

# SINERGITAS SLRT, PUSKESOS DENGAN P2TP2A

**UPAYA MENDEKATKAN AKSES LAYANAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL  
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DI KABUPATEN BANDUNG**



PRINSIP REKRUTMEN DAN PENEMPATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNSUR PENYELENGGARA SLRT . *MANAGER, TA, SUPERVISOR, FASILITATOR DAN PUSKESOS* DIDASARKAN PADA ASAS KETERBUKAAN, MENGUTAMAKAN SUMBER DAYA LOKAL, KESEMPATAN YANG SAMA, MEMPERTIMBANGKAN KUALIFIKASI, DAN MENDORONG **KETERLIBATAN PEREMPUAN.**



30 %



# PUBLIKASI DOKUMENTASI KEGIARTAN SLRT DAN PUSKESOS



# PUBLIKASI MEDIA MASSA CETAK

## Ninin, "Orang Cepot Begitu Ahn Lagusoni" Tim URC SLRT Tangani Keluarga Adin



Tim URC SLRT Tangani Keluarga Adin

Tim URC SLRT Tangani Keluarga Adin

### Fasthutor Jadi Solusi Pecahkan Masalah Kemiskinan

Fasthutor

### SLRT Turun Tangan Penyuluh Ulay

SLRT Turun Tangan Penyuluh Ulay

### SLRT Dorong Kecamatan Segera Rantik Puskesmas Tarp Desa

SLRT Dorong Kecamatan Segera Rantik Puskesmas Tarp Desa

### Keluarga Ini Terpaksa Tinggal di Gubuk

Keluarga Ini Terpaksa Tinggal di Gubuk

### Pembab Segera Fasilitas Keluarga Nono

Pembab Segera Fasilitas Keluarga Nono

### SLRT, Jurus Jitu Tangani Masalah Sosial dan Kemiskinan Terpadu

SLRT, Jurus Jitu Tangani Masalah Sosial dan Kemiskinan Terpadu

### 12 Jiwa Tinggal di Rumah Sempit

12 Jiwa Tinggal di Rumah Sempit

### Warga 'Sakit' Itu Sudah Ditangani Dinsos

Warga 'Sakit' Itu Sudah Ditangani Dinsos

### Tuna Wisma di Baleendah Dievakuasi

Tuna Wisma di Baleendah Dievakuasi

### Tim SLRT dan Satpol PP Evakuasi Warga Telantar

Tim SLRT dan Satpol PP Evakuasi Warga Telantar

### Bocah Berkelainan-Usus Segera Jalani Operasi

Bocah Berkelainan-Usus Segera Jalani Operasi

# Mau Curhat Persoalan Sosial, ke SLRT Saja!

**S**EBORANG lelaki tergo-poh-gopoh memasuki kantor Bidang Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berada di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Kamis (29/3/2018). Membawa setumpuk berkas, dia mendatangi petugas.

"Saya membantu warga yang kesulitan mendapatkan biaya persalinan," kata Soleh, tokoh masyarakat Desa Kamasan, Banjaran.

Ketika belum ada SLRT, menurut Soleh, warga kesulitan mengurus surat rujukan agar mendapatkan bantuan. "Kadang dari satu dinas dilempar ke dinas lainnya. Kalau sekarang, cukup ke satu instansi saja," ujarnya.

Tak hanya Soleh, dalam sehari puluhan bahkan terkadang ratusan warga datang ke SLRT untuk mengurus berbagai masalah. Hal itu yang diibaratkan SLRT sebagai "tem-

pat curhat" bagi warga.

Julukan itu dibenarkan Manajer SLRT Kabupaten Bandung, Nia Nindhawati. "Apa pun persoalan warga yang berkaitan dengan masalah sosial, bisa kami bantu solusinya. Bukan berarti SLRT memiliki dana yang besar, tetapi kami bisa membantu warga untuk mengakses pelayanan dari perangkat daerah di Pemkab Bandung," ujarnya, di ruang kerjanya, Kamis (29/3/2018).

SLRT hadir sebagai solusi pelayanan bagi warga dalam satu pintu. "SLRT bisa dijadikan wadah yang mengintegrasikan beragam kebijakan juga program layanan secara komprehensif, efektif, dan efisien. Apalagi SLRT memiliki jaringan sampai ke desa dengan Pusat Kesejahteraan Sosial meski saat ini baru terbentuk 140 puskesmas dari jumlah desa 270 buah dan 10 kelurahan," ujarnya.

Apabila ada warga yang membutuhkan biaya pendidikan, menurut Nia, SLRT memberikan rujukan agar siswa itu memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Dinas Pendidikan. Demikian pula jika ada warga miskin yang sakit dan belum masuk ke BPJS Kesehatan, bisa diberikan rujukan berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar dirawat di rumah sakit dengan bantuan Pemkab Bandung.

SLRT juga mengakses berbagai dana tanggung jawab sosial perusahaan ataupun dana badan amil zakat untuk kepentingan warga miskin. "Kami juga menyediakan dana lengkap sehingga jika ada dinas atau perusahaan akan mengadakan bantuan sosial bisa meminta kepada kami. Data kemiskinan dan masalah sosial kini satu pintu dari SLRT," katanya. (Sarnapi/"PR")\*\*\*



STAF Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabiluhungan Kabupaten Bandung Iis (kiri) menerima keluhan warga di kantornya, Kompleks Pemkab Bandung, Kamis (29/3/2018). SLRT menjadi tempat warga mengadakan berbagai masalah.\*



## Sabilulungan Ngawangun 1000 Kampung

### Pemkab Bandung Rencanakan Bangun Gedung SLRT

# Marlan, "Upaya Pengentasan Kemiskinan"

**GUNA** mengoptimalkan pelayanan bagi kinerja Sistem Layanan Bujukan Terpadu (SLRT). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung pada tahun 2019 rencananya akan membangun gedung SLRT dua lantai. Hal itu diungkapkan Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, H. Marlan saat menyambut rombongan kunjungan kerja dari Pemkab Sukulu Selatan dan Kota Kmalaya di Bale Winaya ang, Selasa (4/9).

Pemkab Bandung merencanakan pembangunan gedung pada tahun 2019. Luasnya dari luas wilayah yang mencapai 176.238,57 ha dengan penduduk sekitar 3,5 juta tersebar di 31 kecamatan, 10 dan 10 kelurahan. Saat ini belum memana dengan dibangunnya SLRT, diharapkan bisa

meningkatkan kinerja juga pelayanan yang maksimal kepada masyarakat," ungkap Marlan. Sebagai daerah paling buncsu di Jawa Barat yang membentuk SLRT, lanjutnya, Kabupaten Bandung sejak November 2016 lalu sudah mendapatkan apresiasi positif dari Sekretariat Nasional Kementerian Sosial RI sebagai Best Practice SLRT karena dinilai sebagai wilayah yang mengalami progress paling cepat dalam menjalankan fungsi SLRT kepada masyarakat.

"Dari 31 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki SLRT, Kabupaten Bandung masuk sebagai 6 terbaik Nasional selain Kabupaten Sragen, Sleman, Sukabumi, Nusa Tenggara Barat, dan Bantaeng. SLRT Kabupaten Bandung dinilai sebagai best practice karena dalam menjalankan fungsinya, dan sinergitas antar-stakeholder sudah berjalan dengan baik," tutur Marlan.



Marlan melanjutkan, saat ini SLRT Kabupaten Bandung sudah memiliki Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap desa, 280 fasilitator 31 supervisor, mobil ambulance, serta satu unit kendaraan untuk operasional Unit Reaksi Cepat (URC).

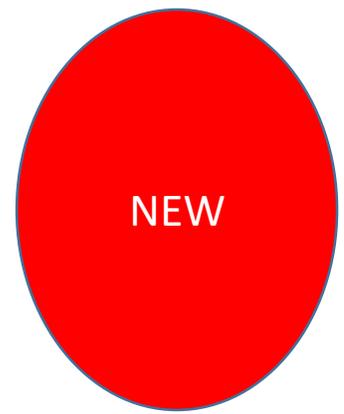
"Kita berharap dengan berkembangnya fasilitasi untuk menunjang pelayanan pada SLRT, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung bisa terdukung. Apalagi berdasarkan rilis BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2018, setiap tahunnya angka kemiskinan di kita (Kab. Bandung) mengalami penurunan yakni dari 8% di tahun 2016, terus menurun menjadi 7,6% tahun 2017, dan pada tahun 2018 sampai bulan September ini berada di angka 7,3%," urai Marlan.

Kabupaten Bengkulu Yunizar, S.H. menj datangnya bersa gan bertujuan unta mengetahui sejauh hasil kinerja SL ngentasan kemiski paten Bandung.

"Kami ingin meli mana SLRT Kabup bisa berhasil deng dalam upaya peng soal-an kesenjanga Apalagi kami ditur mensos sebagai du harus melaksanakan tahun 2018 ini," it Yunizar mengak paten Bandung su menjalankan siste Hal itu terlihat be dari Kemensos, ki mennya dalam pe kemiskinan yang dengan seluruh at ban/"GM"/adv

#### Terintegrasi

Sementara itu, ketua tim rombongan kunjungan kerja dari



pati Ancep D

## PUBLIKASI MEDIA MASSA

“PENYERAHAN KURSI RODA OLEH BUPATI PADA HARI JADI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017  
BERDASARKAN KELUHAN MASYARAKAT DISABILITAS MELALUI SLRT”



Kiriman

**Gusnilo** ▸ **Suara dan keluh kesah Rakyat Kab. Bandung**  
48 mnt • 🌐

NamaKu WIDI ajeng putri alamat kp Nambo rt03/rw012 desa Batu karut kec arjasari Bandung Sekolah SMP Handayani 1 nambo kelas 3 ,Aku butuh alat Bantu Kursi RODA untuk Sekolah dan madrasah juga les Bahasa inggris,kapan pemerintah memperhatikanku,aku sejak kecil tak bisa jalan ,selalu di gendong sama ayah dan ibuku,aku rangking msk 10 besar,katanya ODK (orang dalam kecacatan)selalu diperhatikan pemerintah,,,,,,,,,,,,? Aku ingin sekolah sampai keluar negri bersama kawan2 kita yg cacat



📷 Tulis komentar... 😊



DIRJEN  
LINJAMSOS





KETUA  
FORUM  
PUSKESOS  
KABUPATEN  
BANDUNG

PARA KETUA PUSKESOS  
KABUPATEN BANDUNG





PUSKESOS  
IN  
HOSPITAL



**PUSKESOS**  
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
EXEN BERSAMA DESA SEKARWANGI

**SILVIA MUSTIKA, AMKL**  
KETUA PUSKESOS

**EXEN IS REVOLUTION**

# UNIFORM PUSKESOS







ratni rt 2 rw 09



kasi rt 4rw 1







PUSKESOS  
KENCANA  
BHAkti









- 1. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan
- 2. Hak Untuk Mendapatkan Nama (Identitas)
- 3. Hak Untuk Mendapatkan Status Kewarganegaraan
- 4. Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan
- 5. Hak Untuk Mendapatkan Akses Kesehatan
- 6. Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan
- 7. Hak Untuk Mendapatkan Keadilan
- 8. Hak Untuk Mendapatkan Keamanan
- 9. Hak Untuk Mendapatkan Lahan Perumahan

DESA MENDANGPANDI

PPK AN BERKUALITAS BUKU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DELAPAN FUNGSI KELUARGA

- 1. FUNGSI AGAMA
- 2. FUNGSI SOSIAL
- 3. FUNGSI PERTANJANG
- 4. FUNGSI PERALIHAN
- 5. FUNGSI REPRODUKSI
- 6. FUNGSI SOSIAL
- 7. FUNGSI EKONOMI
- 8. FUNGSI LINGKUNGAN

DAFTAR KEANGGOTAAN

NO	NAMA	ALAMAT	NO HP	ALAMAT	NO HP
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...





PUSKESOS  
MEKARPAWITAN

# KUNJUNGAN SETNAS



















Breping penyaluran bantuan  
lansia..puskesmas sabilulungan desa  
ciburial

09.03

+62 858-7131-7203

~Hilman



09.03



3 PILAR UNSUR  
PENYELENGARA  
SLRT : SV. FS.  
PUSKESOS



NOBAR  
PREMAN  
PENSUN





**KALAU ANDA MAMPU TETAPI MINTA SKTM  
MAKA INSYAALLAH  
ALLAH MENGABULKAN DO'A ANDA  
DESA LANGONSARI KEC. PAMEUNGPEUK KAB. BANDUNG**



























PENANGANAN ORANG  
TERLANTAR





PUSKESOS  
DESA BUAH  
BATU

Foto Bersama Puskesmas Desa Buah Batu  
-6,98798, 107,67084, 2119,4ft  
10 Des 2018 11:15:00





KEGIATAN FASILITATOR  
KONSOLIDASI DENGAN  
KETUA PUSKESOS